

**Literasi Sosial Budaya Masyarakat Penyangga Hutan Terhadap Pelestarian
Taman Nasional Gunung Gede Halimun Salak (TNGHS)*****Socio Cultural Literacy of The Buffer Zone Community Towards Preservation of
The Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS)*****Agus Rusmana¹, Edwin Rizal, Rully Kh. Anwar , Ute Lies Khadijah
Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran****Abstrak**

Wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagai wilayah ekosistem Halimun adalah area pegunungan di Jawa Barat yang memiliki keragaman hayati yang tinggi. Masyarakat tradisional atau lokal telah mengelola sumber daya alamnya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kelengkapan ekosistem wilayah sepenuhnya tergantung pada masyarakat penyangga hutan. Penelitian ini mengidentifikasi literasi sosial budaya masyarakat penyangga hutan terhadap pelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan anggota masyarakat sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tradisional penyangga hutan “Kasepuhan” menyadari peran mereka sebagai bagian dari lingkungan sosial dan mengetahui bagaimana menyesuaikan diri pada masing-masing budaya yang terlibat dalam hubungan sosial. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional memiliki literasi sosial budaya yang tinggi yang mendukung program pelestarian taman nasional.

Kata kunci: pelestarian, taman nasional, masyarakat tradisional

Abstract

The area of Gunung Halimun Salak National Park as the Halimun Ecosystem Zone is a mountain zone in Jawa Barat which has a high bio diversity. The traditional or local community have managed its natural resources by oriented it toward their interests. The completeness of its area ecosystem is fully depended on the buffer zone community. This research is identifying the socio cultural literacy of buffer zone community towards preservation of the Gunung Halimun Salak National Park. The method used is qualitative approach which used the members of the community as informants. The result of the research show that the buffer zone "Kasepuhan" traditional community had realized their role as a part of social environment and had known how to fit themselves in each culture involed in their social relationships. It is concluded that the traditional community have high socio cultural literacy which support preservation program of the park.

Keywords: preservation, national park, traditional community

¹ Korespondensi: Agus Rusmana. Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM21, Jatinangor, Jawa Barat. Email: a.rusmana@unpad.ac.id

Sistem pengelolaan sumberdaya alam yang telah dikembangkan masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang tinggal di daerah penyangga hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), sejak lama merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal/adat yang tinggal di dalam dan atau di sekitarnya, dan kelestarian daya dukung lingkungan dengan cara mengembangkan pola pengelolaan sumberdaya alam yang berasaskan pada prinsip-prinsip desentralisasi, peran serta masyarakat dan keberlanjutan (*sustainability*). Sebagai contoh, pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan lokal di Kawasan Ekosistem Halimun, antara lain stratifikasi leuweung (*leuweung titipan, tutupan, & garapan*), sistem *agroforestry* khas Jawa Barat seperti talun, dudukuhan, kebon kayu, reuma dan huma.

Namun saat ini, sistem tersebut mengalami tekanan-tekanan eksternal, antara lain akibat tidak diakuinya keberadaan masyarakat adat dan lokal dalam sistem pengelolaan sumberdaya alam mereka, dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang bertumpu pada konsep hak menguasai negara. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan masyarakat adat dan lokal yang sebetulnya merupakan pemilik, pengelola, sekaligus penjaga dan pemelihara sumberdaya alam, menjadi terasing di tanahnya sendiri dengan semakin terkungkungnya akses masyarakat terhadap sumberdaya alam.

Bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal, kondisi tersebut di atas dapat menyebabkan mereka kehilangan sumber bahan pangan, sandang, obat-obatan, bahan baku industri rumah tangga dan bahan baku kegiatan spiritual. Hilangnya sumberdaya tersebut selanjutnya dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan praktek tradisional yang kemudian mengakibatkan berubahnya tatanan sosial masyarakat adat.

Setelah sekian lama menghadapi berbagai tekanan, masyarakat adat dan masyarakat lokal mendesak kuat pemerintah untuk segera menghormati, menghargai, melindungi dan mengakui konsep pengelolaan sumberdaya alam yang mereka terapkan selama ini sebagai suatu paradigma baru dalam pembangunan. Di lapangan, sistem ini telah terbukti dapat mempertahankan keberlanjutan secara ekologi, sosial – budaya dan ekonomi. Masyarakat yang berada di Kawasan Ekosistem Halimun tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga ada masyarakat adat yang dikenal dengan Masyarakat Kasepuhan. Untuk masyarakat Kasepuhan, mereka hidup dalam kelompok tersebar di berbagai kampung di sekitar Banten Selatan (Kabupaten Lebak), Sukabumi Selatan dan Bogor Selatan, disepanjang lereng-lereng dan bukit-bukit di sekitar Kawasan Ekosistem Halimun. Berawal dari filosofi hidup yang tertuang dalam suatu kepercayaan yang menganggap bahwa “*Ibu Bumi, Bapak Langit*” yang maknanya adalah keutuhan bumi beserta dengan segala isinya harus dijaga dengan seksama, sebab apabila ada salah satu unsur/makhluk yang dirusak akan mengakibatkan rusaknya keseimbangan proses Kawasan Ekosistem Halimun ini.

Berbagai bentuk pemanfaatan sumberdaya alam di dalam kawasan TNGHS umumnya telah berlangsung sejak sebelum ditetapkannya kawasan tersebut sebagai taman nasional. Beberapa kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam di TNGHS yang penting, antara lain: pemanfaatan lahan untuk pemukiman, budidaya pertanian, penambangan (emas, panas bumi, dan galena), pembangunan infrastruktur (SUTET, jalan kabupaten dan propinsi, desa), dan pemanfaatan hasil hutan di dalam kawasan TNGHS.

Praktek pemanfaatan sumberdaya alam yang kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dapat memicu terjadinya bencana alam di kawasan TNGHS, mengingat karakteristik alamnya menunjukkan adanya titik-titik rawan bencana, antara lain: banjir, tanah longsor, gempa bumi, uap/gas beracun, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Bencana alam dapat menimbulkan resiko sosial ekonomi yang membutuhkan biaya besar.

Selain itu, kerusakan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) yang semakin parah pada akhir-akhir ini telah dianggap melampaui ambang batas toleransi. Padahal Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan hutan yang memiliki posisi strategis, karena merupakan daerah perlindungan bagi sumberdaya hayati, flora, dan fauna yang cukup potensial. Pertambahan penduduk yang sangat pesat di sekitar kawasan, serta terjadinya reformasi politik tahun 1998 yang lalu, memiliki dampak ikutan terhadap kerusakan hutan Taman Nasional ini, akibat penjarahan oleh penduduk. Kerusakan tersebut diperkirakan akan semakin parah, jika tidak segera dilakukan penanganan yang serius oleh semua pihak.

Faktor lain yang tampaknya ikut memberikan kontribusi bagi terjadinya kerusakan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) tersebut adalah faktor sosial budaya masyarakat setempat. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran lingkungan, dan faktor kemiskinan masyarakat daerah penyangga, semakin mempercepat terjadinya perusakan hutan Taman Nasional tersebut. Paradigma pembangunan dari rezim Orde Baru yang memprioritaskan pertumbuhan pada akhirnya hanya melahirkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, menjamurnya konglomerasi, serta kesenjangan sosial.

Perubahan paradigma pengelolaan hutan Departemen Kehutanan akhir-akhir ini tampaknya mulai dapat memberikan angin segar bagi sistem pelestarian hutan dimasa yang akan datang. Asumsi ini diharapkan dapat terealisasi jika paradigma tersebut dilaksanakan secara konsisten, terpadu, dan berkelanjutan. Paradigma departemen dari semula bersifat sentralistik dan hanya memperhatikan aspek ekonomi telah diubah dengan arah yang lebih mengutamakan keseimbangan ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat di sekitarnya. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan strategi pemerintah dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sistem setempat (*community based forest management*) yang sekaligus merupakan upaya penyelamatan kelestarian hutan.

Berdasarkan berbagai kondisi riil tersebut di atas, hal yang perlu mendapatkan prioritas perhatian adalah keterkaitan kondisi sosial budaya masyarakat daerah penyangga Taman Nasional tersebut dalam merespon keberadaan Taman Nasional sebagai sumber kehidupan yang mempengaruhinya. Kiranya tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa faktor perilaku manusia sangat menentukan bagi kelestarian hutan Taman Nasional. Untuk mendapat gambaran tentang literasi sosial budaya masyarakat wilayah penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran Sosial Budaya masyarakat daerah penyangga terhadap Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan bagaimana literasi sosial budaya masyarakat dalam mendukung bagi kelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)?

Metode Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan evaluasi literasi sosial budaya masyarakat di sekitar hutan lindung dalam mengelola sumber daya alam. Penelitian ini akan memfokuskan studi pada literasi sosial dan budaya masyarakat terutama dalam preservasi hutan lindung serta potensi pengembangannya yang dapat diapresiasi oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat ditemukan argumentasi yang jelas mengapa perencanaan hutan lindung ini perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memfokuskan telaahnya pada makna-makna subyektif, pengertian-pengertian, metafor-metafor, simbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi ihwal suatu kasus spesifik yang hendak diteliti. Pendekatan ini dipilih agar studi ini memperoleh gambaran detail dan mendalam informasi mengenai suatu gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis. Peneliti

menempatkan diri sebagai *the insider* yang berusaha sejauh mungkin melakukan empati (atau memproyeksikan diri dalam peran dan persepsi objek yang diteliti) agar bisa sebaik mungkin merefleksikan penghayatan subjektif objek yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sirna Resmi Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Pemilihan ini di Gunung Halimun Salak ditemukan titik lokasi dalam kondisi hutan sekitar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Penelitian berorientasi pada data yang dikumpulkan dari para masyarakat yang melakukan perlindungan dan mengembangkan dalam sebuah kelembagaan masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan budaya dan lingkungan hidup di tiga tempat tersebut yaitu tokoh masyarakat tradisional di kawasan tersebut, warga sekitar yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, pemerintahan kelurahan, hingga Dinas Pariwisata dan Budaya / dinas terkait lainnya serta pihak swasta yang turut aktif mendukung kegiatan tersebut. Berdasarkan azas penelitian kualitatif, analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan yang dianggap kurang memadai, diperlukan aktifitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap.

Untuk membuat data penelitian menjadi sangat lengkap dan komprehensif, peneliti melakukan beberapa kali kunjungan sehingga mendapatkan gambaran tentang beberapa suasana dalam beberapa kegiatan. Melalui kunjungan ini peneliti dapat melihat beberapa peristiwa budaya seperti upacara kecil permohonan ijin untuk melaksanakan pernikahan dari seorang wakil keluarga pengantin kepada Abah Asep sebagai ketua adat. Kunjungan lain memberikan gambaran bagaimana masyarakat adat kasepuhan melakukan interaksi dengan masyarakat luar melalui rapat bersama membahas program perbaikan dan pemeliharaan lingkungan. Peristiwa lain yang teramati sebagai ukuran pemahaman masyarakat adat terhadap sosial budaya masyarakat luar adalah keterlibatan anggota masyarakat adat dalam upacara dan acara pernikahan yang dilakukan oleh sebuah keluarga di luar masyarakat adat yang berlokasi di sekitar lingkungan wilayah masyarakat adat.

Seluruh peristiwa yang teramati selama kunjungan, dan hasil obrolan serta wawancara dengan anggota masyarakat umum, sesepuh Sinar Resmi, pejabat pemerintah desa dan kecamatan, direkam dalam bentuk tulisan dan foto dokumentasi untuk kemudian digunakan untuk melakukan analisis dan pembuatan laporan.

Hasil

Karakteristik dan kinerja kelembagaan tradisional, khususnya kelembagaan yang terkait dengan aktifitas ekonomi di pedesaan.

Komunitas adat Kasepuhan Sinar Resmi yang ketuanya berdomisili di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi adalah suatu komunitas dengan segala kearifan lokalnya yang dalam kesehariannya, menjalankan sosio budaya tradisional yang mengacu pada karakteristik budaya Sunda pada abad ke-18. Kasepuhan Sinar Resmi merupakan satu dari sebelas kasepuhan yang berada di wilayah Banten Selatan. Komunitas ini hidup secara turun temurun dari generasi ke generasi, jati diri inilah yang masih dipelihara dan diperkuat sebagai perwujudan rasa syukur dan penghormatan kepada para leluhur yang lahir dari sebuah proses sejarah yang tidak terputus dalam perjalanan masa untuk terus menegakan martabat beserta

hak asal-usul sebagai identitas budaya dan warisan budaya nasional. Dengan sistem yang diwariskan para leluhur, masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi menata seluruh kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial dan religius yang khas, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sistem-sistem inilah yang dipertahankan dan diperjuangkan sebagai sumber semangat hidup yang terkandung dalam sistem adat yang masih dibudayakan dan dilestarikan.

Setiap program pembangunan yang akan dijalankan di wilayah komunitas adat Sinar Resmi, selain melibatkan masyarakat yang juga anggota komunitas adat yang tidak terikat pada daerah dimana dia tinggal namun terikat oleh sebuah hubungan kekerabatan tradisional walaupun warga tersebut tinggal di tempat lain. Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di komunitas adat selalu disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga komunitas. Salah satu sarana yang dapat dijadikan sosialisasi adalah pertemuan rutin warga. Pada pertemuan yang dilakukan setiap bulan ini, kepala adat "sesepuh" mensosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat di komunitas adat. Masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi tidak pernah terlepas dari filosofi-filosofi hidup yang sudah menjadi satu jiwa pada diri masyarakat kasepuhan sendiri. Filosofi inilah yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, basis dari hukum adat kasepuhan adalah filosofi hidup, "*tilu sapamulu, dua sakarupa, hiji eta-eta keneh*", yang secara harfiah artinya 'tiga se wajah, dua se rupa, satu yang itu juga'.

Berdasarkan filosofi-filosofi inilah masyarakat kasepuhan memiliki keyakinan untuk terus menjaga apa yang sudah diwariskan oleh para leluhurnya, baik menjaga hubungan dengan manusia lain dan menjaga hubungan dengan alam. Salah satu warisan leluhur yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat kasepuhan adalah sistem pertanian ladang/huma (*rurukan*) dan sawah yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Sistem pertanian ini tidak sekedar sebuah kegiatan pertanian yang secara umum menuju pada produktivitas, namun sistem pertanian di masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi lebih berorientasi pada suatu interaksi yang kuat antar masyarakat dengan Tuhan, masyarakat dengan masyarakat serta masyarakat dengan alam. Dalam pengelolaan sistem pertanian, mulai dari mempersiapkan lahan sampai pada mengistirahatkan lahan kembali selalu diikuti dengan rangkaian upacara atau ritual adat yang menyertainya yang sudah diwariskan oleh para leluhur.

Aktivitas aparat desa membantu penyampaian program komunitas adat merupakan peluang untuk membangkitkan partisipasi masyarakat komunitas adat. Dengan penyampaian pesan secara dialogis tersebut merupakan kesempatan untuk bertukar pikiran mengenai kegiatan pembangunan baik yang akan mampu sudah dilakukan. Komunikasi timbal balik ini diharapkan memberikan suatu pencerahan bagi warga dan aparat Kecamatan itu sendiri. Dalam konteks pertemuan warga tersebut setiap warga diberi kebebasan untuk menyampaikan permasalahan yang dimiliki masing-masing. Dalam keadaan seperti ini aparat desa dan para pemimpin komunitas adat bisa memahami realitas persoalan yang sedang dihadapi warganya.

Persoalan-persoalan yang dihadapi warga tersebut diharapkan ada benang merah permasalahan pokok di komunitas adat dan pemerintahan daerah tersebut. Inventarisasi permasalahan di komunitas adat memberi kontribusi dalam penentuan prioritas rencana pembangunan di Kecamatan Csolok pada umumnya. Penentuan skala prioritas inilah menjadi tanggungjawab kepala Kecamatan dan stafnya dalam menyalurkan anggaran pembangunan maupun menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam pertemuan warga kasepuhan, ketua adat mempunyai peluang untuk bertatap muka (*face - to face communication*) dengan masyarakatnya. Pertemuan yang intensif akan mendukung terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan. Rasionalisasi kebijakan akan diambil dari warga dengan internal dan holistik. Kepercayaan (*trust*) dari masyarakat di kecamatan tersebut akan memberi kontribusi secara riil terhadap keberhasilan pembangunan. Transparansi rencana dan pelaksanaan pembagian di kecamatan akan menimbulkan daya dukung (*responsiveness*) warga. Komunitas adat dikategorisasikan sebuah komunitas yang ada dipinggiran oleh globalisasi: pertama, sebagian wilayahnya lebih kecil atau sama dari sebuah dusun namun pengaruh modernisasi jelas terlihat dalam tatanan kehidupan masyarakat di sekitar komunitas adat. Terkait dengan potensi ekonomi komunitas yang mereka miliki, ada beberapa aspek ekonomoi menonjol yang berhasil digali secara mendalam dan secara potensi dapat dikembangkan sebagai basis kehidupan ekonomi masyarakat sirna resmi utamanya dalam hal menjaga kearifan lokal adat dan sumber pendapatan mereka. Fasilitas angkutan menuju lokasi termasuk mudah dijangkau. Oleh karena itu komunitas adat yang merupakan tempat yang sedang berproses untuk perubahan. Kedua, kondisi komunitas adat Sinar Resmi sebagian wilayahnya sudah dipakai oleh pembangunan yang dibangun oleh dinas kehutanan. Keberadaan pemerintahan daerah dalam memantau komunitas adat dalam aspek penggunaan tanah dan aspek politik yang dinilai masyarakat sebagai salah satu mesin politik yang bisa digerakkan.

Literasi Sosial Budaya Masyarakat Adat Kasepuhan

Karakteristik masyarakat yang ada di komunitas adat cenderung homogen, komunitas adat merupakan sebuah tempat dimana tidak hanya terikat oleh letak geografisnya saja namun juga lebih pada aspek bagaimana komunitas adat yang merupakan pemilik hutan lindung sejak dulu. Perbedaan-perbedaan yang terjadi antara dua bagian masyarakat tersebut mempunyai potensi konflik kepentingan. Dalam kondisi demikian aparat pamong kecamatan dituntut untuk mempunyai sensitifitas dalam setiap menentukan kebijakan di tingkat komunitas adat dan pemerintahan daerah, makin heterogen. Dalam komposisi masyarakat yang semakin homogen, aparat desa dituntut untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada warganya. Optimaliasi pelayanan dapat menggunakan berbagai sarana yang ada. Salah satunya pertemuan komunitas adat merupakan di pendekatan dengan dinas kehutanan yang seringkali mengalami perbedaan persepsi mengenai kawasan pengelolaan hutan yang dilihat segi ongkos kegiatan pendekatan ini memiliki konflik sangat minimal tetapi dari keuntungan pembangunan di kawasan komunitas adat sangat besar.

Masyarakat Kasepuhan Sirna Resmi masih memelihara cara bertani tradisional. Mereka menggarap tanah dan menanamnya setahun sekali. Hal itu mereka lakukan demi penghormatan kepada Ibu Bumi. "Masa, Ibu dipaksa melahirkan dua kali setahun. Yang benar saja," demikian prinsip Abah Asep. Bumi ini adalah makhluk hidup. Karena itu tradisi mengajarkan tentang ritus pertanian. Sebelum mengolah tanah, mereka lakukan upacara. Menurut keyakinan mereka, untuk mengolah tanah perlu pamit dulu *atau* permissi karena bumi ini adalah makhluk yang telah dikotori. Itulah yang mereka lakukan.

Secara resmi, warga Kasepuhan mengakui beragama Islam dan di lokasi kediaman mereka terdapat sebuah masjid yang didirikan di tengah kampung. Namun mereka masih memberikan ritus atau sesajian buat Dewi Sri. Padi dalam konsep kasepuhan dimaknai sebagai Dewi Sri (Ibu), sehingga mulai dari tanam sampai panen dan memasak dan memakannya menggunakan tata cara penghormatan tertentu. Ada banyak upacara adat yang berhubungan dengan pertanian padi, misalnya pada saat akan memulai kegiatan pertanian

harus meminta izin terlebih dahulu kepada abah. Setelah abah mendapatkan wangsit barulah memberikan izin kepada incu putu untuk melakukan kegiatan pertanian secara serentak pada bulan tertentu yang sudah ditetapkan oleh adat. Dalam setiap kegiatan pertanian juga terdapat berbagai macam upacara ritual, misalnya pada saat memilih bibit, dilakukan upacara ritual dengan cara membakar kemenyan dan melantunkan do'a, begitupun pada saat menabur benih.

Pada saat membuka ladang, selain membakar kemenyan juga menyediakan tumpeng. Upacara ritual yang mirip perlakuannya di dalam ritual manusia adalah pada saat *mapag pare nyiram* (yaitu saat pohon padi mulai berbunga). Pada upacara ini tanaman padi diperlakukan seperti wanita yang sedang hamil 7 bulan, karena itu upacara juga diwarnai dengan penyediaan rujukan 7 macam rujak, bubur merah dan putih, dan dilakukan doa selamatan seperti pada manusia, seperti membaca surat Yusuf dan Surat Maryam. Tujuan dari upacara ini agar padi yang mulai berbuah tadi selamat dan menghasilkan biji padi yang banyak. Selanjutnya, sebelum panen, setelah panen (nganyaran padi) juga dilakukan upacara berupa penyediaan kemenyan, kopi, rokok dan kue serta doa-doa. Upacara terbesar adalah pada saat memasukkan padi ke lumbung yang disebut upacara seren tahun. Upacara ini dilakukan selama 3 hari - 3 malam oleh seluruh incu putu yang langsung dipimpin oleh 'abah' (panggilan kepada Ketua Adat Kasepuhan). *Bapak langit*, menunjukkan adanya pengetahuan lokal yang dilandaskan pada kejadian di alam semesta (langit) dalam hal mengolah tanah pertanian, yaitu dalam menentukan waktu untuk menggarap lahan melihat pada bintang kerti dan kidang. Kerti dan kidang adalah rasi bintang yang dilihat di langit pada malam hari. Kerti adalah bintang ngaronyok (kumpulan bintang), kidang adalah bintang waluku (nu tilu) bentuknya seperti layang-layang.

Berlakunya hukum alam Kerti dan Kedang: *dimana-mana tina kerti kudu turun besi, dimana-mana tina besi kudu turun...*; *dimana-mana timbul kidang kudu turun kujang* (artinya kalau bintang kerti sudah terlihat maka petani harus sudah menyiapkan peralatan cangkul, parang dan lain-lain, dan jika bintang kidang sudah terlihat maka petani sudah diperbolehkan untuk turun ke sawah atau huma untuk menggarap lahannya). Guru mangsa yaitu berguru pada alam semesta dalam hal menentukan waktu kapan boleh bertani dan tidak. Tujuannya adalah *ngudag akuan* (mengejar hak atas tanah). Bintang kerti menjadi tanda awal untuk menggarap lahan. Meskipun hujan belum juga turun, mereka tetap menanam sesuai dengan pakem-pakem tradisi. Bulan September-April adalah hak untuk petani sedangkan Mei sampai Agustus adalah hak bagi makhluk lain seperti hama dan lain-lain (tidak boleh disebut). Setelah menanam padi, lahan pertanian dipagar dengan ajian (doa): 'ulah arek comokot kana tetendenan aing, ulah herey, ulah bader' (jangan ngambil simpanan aku, jangan main-main, jangan nakal). Pemagaran ini didasarkan pada prinsip '*opat panahap kalima pancar*' (empat arah mata angin, Barat-Timur-Selatan-Utara, dan satu pusat), yang sebenarnya mengandung siloka berbeda-beda tetapi satu tujuan.

Dalam menjalani kehidupan sosialnya, anggota masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi menggunakan dua kelembagaan sosial, yaitu kelembagaan sosial masyarakat resmi yang sudah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia, dan kelembagaan sosial yang dibuat dan diberlakukan untuk seluruh anggota masyarakat adat Kasepuhan. Salah satunya adalah pernikahan, Seperti masyarakat umumnya, pelaksanaan pernikahan warga masyarakat adat dilaporkan tercatat secara resmi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka tinggal, dalam hal ini adalah Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi. Namun untuk seluruh pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan, seluruh anggota masyarakat adat kasepuha harus mengikuti adat istiadat yang dibuat dan diberlakukan oleh

kasepuhan, seperti permintaan ijin menikah kepada Ketua Adat Kasepuhan, upacara pernikahan dan persyaratan adat pernikahan lainnya. Kepada Adat Kasepuhan Sinar Resmi menyebutkan bahwa upacara adat dilaksanakan setelah seluruh persyaratan menikah yang diwajibkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan telah terpenuhi. Diputuskan oleh masyarakat adat bahwa urusan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah harus didahulukan.

Di tengah gempuran modernisasi dengan masuknya berbagai pengetahuan dan teknologi Barat, seperti parabola, televisi bahkan telepon seluler membuat arus informasi luar tidak lagi bisa dicegah. Pengaruh globalisasi ini semakin terasa dan merubah gaya hidup masyarakat. Beberapa rumah penduduk tidak lagi bercirikan model rumah adat yang ber dinding bambu dan beratapkan ijuk, namun seiring masuknya modernisasi, beberapa rumah penduduk sudah mulai menggunakan atap genteng dan dinding beton, walaupun itu hanya beberapa. Bahkan pupuk kimia yang dulu tabu, sekarang sudah mulai digunakan oleh beberapa orang. Namun demikian, sekalipun arus modernisasi sangat deras menerpa kehidupan masyarakat kasepuhan, Namun kesetiaan terhadap tradisi masih terus dijaga, seperti hanya menanam jenis padi tertentu, pantang menjual beras, hingga perintah untuk berpindah tempat masih terus ketat dijalankan. Semua tradisi tersebut selalu dikaitkan dengan keberadaan perintah dari leluhur (wangsit), yang terus dipelihara oleh abah dan pengikutnya. Peningkaran terhadap wangsit akan berdampak pada hukuman leluhur berupa "kabendon". Dipercaya oleh masyarakat kasepuhan, bahwa apabila melanggar hukum adat akan kena sanksi adat yang disebut kabendon, yang berupa terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Karena kena *kabendon*, seseorang misalnya dapat tersesat di hutan hingga meninggal. Orang bisa terbebas/terlepas dari kabendon apabila ingat akan kesalahan dan pelanggaran yang diperbuat, dan segera mohon ampun dan minta maaf pada abah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Masih kuatnya kepercayaan terhadap leluhur, wangsit dan ketakutan akan kabendon inilah yang membuat berbagai tradisi dan pengetahuan lokal tetap terpelihara dan dijalankan. Kalaupun ada perubahan seperti kepemilikan TV, HP, mobil bahkan perubahan pada bentuk fisik rumah dan penggunaan pupuk kimia semua itu diijinkan oleh leluhur melalui restu abah. Selama abah merestui maka leluhur dianggap merestui, karena landasan restu abah adalah restu leluhur.

Literasi dan Penerimaan pada Sosial Budaya Masyarakat Luar

Walaupun masyarakat tradisional Kasepuhan Sinar Resmi di Cisolok Kabupaten Sukabumi bertempat tinggal di lokasi terpisah dari tempat tinggal masyarakat umum dan memiliki kebiasaan, adat dan budaya tersendiri, interaksi yang intens antara mereka dengan masyarakat umum membuat mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi tentang keberadaan budaya di luar mereka. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain kebutuhan yang dapat dipenuhi sendiri seperti beras dan sayuran, warga masyarakat tradisional Kasepuhan membelinya dari warga luar. Begitu juga warga Kasepuhan Sinar Resmi bersedia untuk menjual kelebihan hasil panen mereka kepada warga masyarakat di luar, baik melalui perdagangan langsung maupun melalui system jual beli di pasar seperti umumnya.

Literasi sosial budaya warga Kasepuhan berupa pengetahuan, pengertian dan pemahaman akan keberadaan kehidupan sosial dan budaya warga masyarakat luar yang berbeda ditunjukkan dengan penerimaan mereka pada adanya kegiatan budaya yang dilakukan di dekat lokasi tempat tinggal mereka. Warga Kasepuhan menerima dengan terbuka, bahkan ikut serta mengikuti acara budaya berupa upacara hiburan dalam resepsi

pernikahan atau acara lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Sebaliknya, warga Kasepuhan juga terbuka pada kehadiran masyarakat luar yang ingin melihat dan terlibat dalam peristiwa budaya yang diselenggarakan oleh warga Kasepuhan dalam waktu-waktu tertentu. Pemahaman sosial juga ditunjukkan dengan kesediaan mereka menerima tawaran sponsor perusahaan untuk mendukung acara seperti "Seren Tahun" yang merupakan upacara besar dengan peserta yang sangat banyak sehingga membutuhkan biaya yang tinggi.

Penerimaan warga Kasepuhan Sinar Resmi Sinar Resmi pada bentuk kehidupan sosial di luar budayanya telah mendorong mereka untuk bersedia menerima dan bahkan ikut menggunakan teknologi modern yang mereka kenali sebagai penunjang untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan memudahkan kerja mereka. Untuk menunjang transportasi dari dan ke tempat tinggal mereka, warga Kasepuhan telah menggunakan dan memiliki kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Namun karena jalan utama untuk menuju kampung Kasepuhan Sinar Resmi bukan merupakan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun Kecamatan Cisolok, maka jalan tersebut tidak beraspal sehingga becek dan berlumpur saat musim hujan. Kondisi ini berbeda dengan beberapa kebiasaan atau adat masyarakat tradisional lain seperti misalnya masyarakat adat Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak membolehkan masuknya kendaraan bermotor ke wilayah kampung adat mereka. Persamaan kedua adat ini adalah mereka tetap menggunakan kayu bakar dan arang sebagai bahan bakar untuk memasak dan tidak menggunakan gas (LPG) seperti yang lazim digunakan oleh masyarakat umum.

Modernisasi berbasis teknologi lain yang juga dapat diterima dan digunakan sebagai tanda dimilikinya literasi warga Kasepuhan pada keberadaan sosial dan budaya adalah teknologi komunikasi. Warga Kasepuhan Sinar Resmi sudah umum memiliki dan menggunakan telepon genggam dan memiliki pesawat televisi dengan dukungan teknologi parabola (untuk menangkap siaran yang dipancarkan langsung via satelit).

Literasi Sosial Budaya dan Pelestarian Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

Analisis pada data yang terkumpul dari hasil pengamatan dan wawancara selama penelitian menunjukkan bahwa literasi sosial budaya yang dimiliki oleh warga masyarakat tradisional telah membuat warga bersedia menerima dan berpartisipasi pada program pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan yang penanggung jawab Taman Nasional Gunung Gede Halimun Salak (TNGHS). Warga kasepuhan Sinar Resmi sangat memahami pentingnya program pelestarian lingkungan untuk kelangsungan taman nasional dan kehidupan mereka sendiri selama bermukim di kawasan taman nasional. Literasi sosial budaya warga Kasepuhan juga mendorong mereka untuk bersedia menerima ajakan untuk bekerjasama dengan pengelola TNGHS dalam menggarap lahan yang diperuntukan sebagai lahan perhatian dan tempat pemeliharaan tanaman keras sebagai kebutuhan taman nasional. Pemahaman ini terlihat juga dari kesediaan warga untuk hanya menggunakan lahan yang disediakan untuk bertani dan tidak memaksa pemerintah agar membolehkan mereka menggunakan lahan lain untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Sebaliknya warga kasepuhan juga hanya menebang pohon untuk keperluan pembangunan rumah atau bangunan lain di lokasi yang diijinkan. Literasi sosial budaya menjadi salah satu dasar yang digunakan untuk memahami bahwa walaupun mereka sudah tinggal dan hidup di wilayah itu jauh sebelum keberadaan taman nasional, mereka tidak bersikeras untuk menguasai lahan yang

mereka anggap milik mereka walaupun secara adat mereka berhak untuk melakukan itu semua.

Simpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat sebagai salah satu *stake holder* dalam proses pembangunan pedesaan di Kecamatan Cisolok ternyata memainkan peranan yang sangat signifikan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan yang cukup tinggi tentang bagaimana mereka harus berperan dan bertindak sebagai anggota sebuah lembaga sosial. Kuatnya kehadiran teknologi informasi berupa alat teknologi komunikasi berbasis Internet telah memaksa masyarakat adat untuk dapat hidup menyesuaikan diri dengan pola dan gaya komunikasi yang baru.

Struktur masyarakat tradisional yang dalam pemeritahan resmi merupakan bagian dari struktur negara membuat warga masyarakat tradisional harus mengikuti seluruh peraturan administrasi dan kewajiban sebagai warga Negara RI. Dengan kewajiban ini maka masyarakat tradisional harus juga berinteraksi dengan masyarakat umum dan aparat pemerintah setempat. Kekhawatiran bahwa interaksi masyarakat tradisional dengan masyarakat umum dan aparat pemerintah akan mengganggu pola dan kebiasaan hidup mereka ternyata tidak terbukti. Pertemuan dengan masyarakat luar dan pemerintah daerah menumbuhkan pemahaman masyarakat tradisional tentang adanya budaya lain di luar budaya mereka dan pemahaman tentang bagaimana berperilaku menyesuaikan diri dengan budaya-budaya yang beragam tersebut.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat tradisional "Kasepuhan" adalah bahwa pola dan kebiasaan hidup mereka merupakan kepercayaan dan keyakinan yang paling tepat untuk bisa hidup harmonis dengan alam sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak sangat kuat. Hal ini mendorong anggota masyarakat tradisional untuk tetap menggunakan keputusan dari kepala adat sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, di samping menjalankan peraturan pemerintah. Dengan keterbukaan ini maka masyarakat tradisional Kasepuhan Sinar Resmi dapat menjalankan pola kehidupan sehari-hari sesuai tradisi kehidupan berbasis budaya dan tetap mampu mengikuti semua aturan kehidupan sebagai warga Negara.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang mendukung dan berkontribusi pada penelitian sehingga dapat membuahkan laporan yang baik sampai tersusunnya artikel ini, yaitu kepada: 1) Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini adalah Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi seluruh keperluan penelitian, 2) Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian, 3) Tim penelitian yang telah mendukung hingga terkumpulnya semua data yang dibutuhkan, 4) Abah Asep, Ketua Adat Kasepuhan Sinar Resmi dan para sesepuh yang telah bersedia menjadi nara sumber penelitian, 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terutama pejabat Kecamatan Cisolok yang telah memberikan kelancaran pelaksanaan kunjungan ke lokasi penelitian, 6) Rekan-rekan dosen yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk melaksanakan kegiatan penelitian, 7) Pengelola Record and Library Journal yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan artikel hasil penelitian. Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal atas semua kebaikan yang diberikan

Referensi

- Adeliny, N., Ninis. A. D., & Khadijah, U. L. S. (2013). Kegiatan pelestarian bahan pustaka pasca gempa di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 1(1), 1-8.
- Anwar, R. L., Rizal, E., & Saepudin, E. (2015). Kemampuan literasi informasi siswa tentang apotik hidup berbasis individual competence framework. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(1), 7-29,
- Komariah, N., Yusup, P. M., Rodiah, S., & Saepudin, E. (2015). Literasi informasi masyarakat pesisir dala program pemberdayaan perempuan di Kecamatan Cipatujah. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), 119-129,
- Maharani, D. (2014), Makna pariwisata pulau kemaro menurut pengunjung dan perilaku komunikasinya. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(1), 73-84,
- Rahman, B., & Yuswadi, H. (2000). *Sistem sosial budaya indonesia*. Jember: Universitas Jember
- Saepudin, E. (2013). Literasi informasi kesehatan lingkungan pada masyarakat pedesaan: studi deskriptif di Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 1(1), 81-89,
- Saepudin, E., Rusmana, A., Budiono, A. (2016). Penciptaan pengetahuan tentang tanaman obat herbal dan tanaman obat keluarga. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 4(1), 73-81.
- Sedana, I. N., Damayani, N. A., & Khadijah, U. L. S. (2013), Preservasi berbasis kearifan lokal: studi kasus mengenai preservasi preventif dan kuratif manuskrip lontar sebagai warisan budaya di Kabupaten Klungkung Bali. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 1(1), 91-103,
- Sukaesih, & Rohman, A. S. (2013). Literasi informasi pustakawan: Studi kasus di Universitas Padjadjaran. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 1(1), 73-79.
- Suwanto, S. A. (2015). Analisis literasi informasi pemakai taman bacaan masyarakat (TBM), *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(1), 75-84.
- Usman, S. (2001). Konflik dan Resolusi Konflik Sumberdaya Alam Perspektif Sosiologi. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Tgl. 15 September 2001 di Yogyakarta*.